ANALISIS RASIO UNTUK MENGUKUR KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2011-2013

WIRMIE EKA PUTRA*)
CORIYATI)**

*) Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi
**) Alumni Prodi Keuangan Daerah Universitas Jambi

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah berdasarkan analisis rasio keuangan pada APBD Kabupaten Sarolangun dan untuk mengetahui perkembangan pendapatan APBD Kabupaten Sarolangun. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode analisis rasio.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian selama tiga tahun anggaran adalah rendah sekali dengan rata-rata 4,26 persen, rasio efektivitas selama tiga tahun anggaran adalah sangat efektiv dengan rata-rata 102,2 persen, rata-rata rasio aktivitas selama tiga tahun anggaran pada belanja operasi sebesar 66,77 persen dan pada belanja modal sebesar 27,12 persen, rasio pengelolaan belanja mengalami surplus anggaran setiap tahunnya dan memiliki rata-rata sebesar 104,85 persen, serta pada rasio pertumbuhan PAD memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 0,13 persen dan Pendapatan memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 7,45 persen, sedangkan rasio belanja operasi memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 6,46 persen dan rasio belanja modal memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 2,99 persen. Adapun perkembangan pendapatan APBD Kabupten Sarolangun mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Kata Kunci: Analisis Rasio, Kinerja, Pengelolaan Keuangan Daerah.

Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dalam upaya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat, antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak dapat dilakukan pemisahan dan merupakan satu kesatuan. Dalam otonomi daerah, masalahnya bukan hanya daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, untuk itu, semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai

proses penyelenggaraan pemerintah pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khusunya. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Undang-undangan Nomor 33 tahun 2004 secara khusus telah menetapkan landasan yang jelas dalam penataan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah, antara lain memberikan keleluasaan dalam menetapkan produk pengaturan sebagai berikut :

1. Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah.
2. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Surat keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut.
3. Kepala daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD mengenai pengelolaan keuangan daerah dan kinerja keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektivitas keuangan.
4. Laporan pertanggung jawaban keuangan daerah tersebut merupakan dokumen daerah sehingga dapat di ketahui oleh masyarakat.

Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumberdaya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, dalam proses dan mekanisme penyusunan APBD yang di atur dalam peraturan pemerintah ini akan memperjelas siapa bertanggungjawab. Sebagai landasan pertanggung jawaban baik antara eksekutif dan DPRD, maupun diinternal itu sendiri.

Ruang lingkup keuangan daerah meliputi :

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga.
3. Penerimaan daerah
4. Pengeluaran daerah
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang.
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangkat penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan kepentingan umum.

Persoalan keuangan daerah merupakan salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah, meskipun diakui bahwa berbagai variabel lain juga mempengaruhi kemampuan keuangan daerah, seperti misalnya variabel sumber daya manusia, organisasi, manajemen, sarana dan prasarana serta variabel penunjang lainnya. Pentingnya variabel keuangan daerah berkaitan dengan kenyataan bahwa mobilisasi terhadap sumber-sumber daya keuangan daerah dipandang sebagai bagian yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk menentukan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dituangkan dalam bentuk kebijaksanaan keuangan pemerintah daerah merupakan salah

satu pemicu pertumbuhan perekonomian suatu daerah. Kemampuan daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam APBD yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan keuangan daerah akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas (pertanggungjawaban) pemerintah daerah atas sumber yang dipercayakan. Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah ia berhasil menjalankan tugasya dengan baik atau tidak.

Dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah di era otonomi daerah yaitu terkait dengan pengelolaan APBD perlu ditetapkan standar atau acuan kapan suatu daerah dikatakan mandiri, efektiv dan efisien serta akuntabel. Untuk itu diperlukan suatu pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai tolak ukur dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efektiv dan efisien. Dalam sistem manajemen strategi, pengukuran kinerja berfungsi sebagai alat penilai apakah strategi yang sudah ditetapkan telah berhasil dicapai. Dari hasil pengukuran kinerja dilakukan *feedback* sehingga tercipta sistem pengukuran kinerja yang mampu memperbaiki kinerja organisasi secara berkelanjutan (*continuous improvement*). Berdasarkan *feedback* (umpan balik) hasil pengukuran kinerja bisa memperbaiki kinerja pada periode berikutnya baik dalam perencanaan maupun dalam implementasi, Mahsun, (2006:145) dalam Fidelius (2013).

Adapun perekonomian Kabupaten Sarolangun lebih didukung oleh sektor pertanian. Pada tahun 2011 laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Sarolangun sebesar 22,97 persen pada tahun 2012 laju pertumbuhan mengalami penurunan sebesar 15,28 persen dan pada tahun 2013 laju pertumbuhan Kabupaten Sarolangun mengalami peningkatan lagi sebesar 19,55 perse. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel. 1 dibawah ini :

Tabel. 1. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sarolangun Tahun 2011-2013 (Dalam Persen)

No	Tahun	PDRB
1	2011	22,97
2	2012*	15,28
3	2013**	19,55

Sumber : BPS Kabupaten Sarolangun

Keterangan :
***** Angka di Perbaiki
****** Angka Sementara

Belanja pemerintah daerah pada tahun 2011 untuk belanja operasi sebesar Rp. 448.053.261.274,00 dan untuk belanja modal sebesar Rp. 185.875.313.011,00, pada tahun 2012 untuk belanja operasi meningkat sebesar Rp. 505.578.240.245,00 dan untuk belanja modal meningkat sebesar Rp. 219.506.728.078,00, serta pada tahun 2013 terjadi peningkatan lagi untuk belanja operasi sebesar Rp. 538.695.602.444,00 dan untuk belanja modal menurun sebesar Rp. 199.497.286.754,00. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel. 2 dibawah ini :

Tabel. 2. Perkembangan Belanja Kabupaten Sarolangun Tahun 2011-2013 (Dalam Rupiah)

No	Tahun	Belanja Operasi	Belanja Modal
1	2011	448.053.261.274,00	185.875.313.011,00
2	2012	505.578.240.245,00	219.506.728.078,00
3	2013	538.695.602.444,00	199.497.286.754,00

Sumber : DISPENDA Kabupaten Sarolangun

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya, Halim Abdul (2007). Analisis rasio dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecendrungan yang terjadi. Hal tersebut di atas mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan **" Analisis Rasio untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Sarolangun Tahun 2011-2013 ".**

Perumusan Masalah

1. Bagaimana kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan analisis rasio keuangan pada APBD Kabupaten Sarolangun ?
2. Bagaimana perkembangan pendapatan APBD Kabupaten Sarolangun ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan analisis rasio keuangan pada APBD Kabupaten Sarolangun.
2. Untuk mengetahui perkembangan pendapatan APBD Kabupaten Sarolangun.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang di tunjukkan untuk mengumpulkan informasi aktual secara terperinci yang melukiskan atau menggambarkan situasi atau peristiwa yang terjadi pada objek penelitian. Menurut Sugiyono (2012) statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk atau generalisasi.

Jenis Dan Sumber Data

Guna kepentingan analisis ini perlu didukung dengan data yang akurat dan terpercaya, dalam penelitian ini terdapat dua klasifikasi data yaitu data sekunder dan data primer.

Jenis Data

1. Data Sekunder

Data Sekunder yang di butuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai instansi terkait yang meliputi : Data Laporan Realisasi Anggaran, Data Laporan Realisasi Penerimaan Daerah, Data PDRB, Data Jumlah Penduduk dan Data Luas Wilayah Kabupaten Sarolangun.

2. Data Primer

Data Primer diperoleh dari sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa melalui media perantara.

Sumber Data

Sesuai dengan metode yang di gunakan dalam pengumpulan data, peneliti memperoleh data tersebut dari:

1. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sarolangun.
2. Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Sarolangun.
3. Perpustakaan

Metode Analisis Data

Dalam menjawab rumusan masalah penelitian ini metode analisis yang penulis gunakan adalah metode analisis deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif.

1. Untuk menjawab rumusan masalah pertama, yaitu melihat besarnya kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sarolangun digunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan rumus sebagai berikut :

a. Menghitung rasio kemandirian keuangan daerah berdasarkan APBD dengan rasio kemandirian.

Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan pada tabel. 1 dibawah ini.

Tabel. 3. Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Keuangan Kemandirian

No	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
1	0% - 25%	Rendah Sekali
2	25% - 50%	Rendah
3	50% - 75 %	Sedang
4	75 %	Tinggi

Sumber : Halim Abdul (2002)

b. Menghitung rasio efektivitas berdasarkan APBD dengan rasio efektivitas

Nilai efektivitas diperoleh dari perbandingan sebagaimana tersebut diatas, diukur dengan kriteria penilaian kinerja keuangan pada tabel. 2 dibawah ini.

Tabel. 4. Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio Efektivitas	Efektivitas Keuangan Daerah Otonom dan Kemampuan Keuangan
>100	Sangat Efektiv
>90-100	Efektiv
>80-90	Cukup Efektiv
> 60-80	Kurang Efektiv
≤ 60	Tidak Efektiv

Sumber : Halim Abdul (2002)

c. Menghitung rasio aktivitas yang terdiri dari Rasio belanja operasi terhadap APBD dan Rasio belanja modal terhadap APBD
d. Menghitung rasio pengelolaan belanja dengan Menghitung surplus/defisit anggaran dan Menghitung rasio pengelolaan belanja.
e. Menghitung rasio pertumbuhan dengan persentase pertumbuhan PAD, persentase pertumbuhan total PAD, persentase pertumbuhan belanja operasi, dan persentase pertumbuhan belanja modal

2. Untuk menjawab rumusan masalah kedua, yaitu mengetahui perkembangan pendapatan APBD Kabupaten Sarolangun digunakan analisis deskriptif kualitatif. Metode ini ditampilkan dalam bentuk data dan tabel, kemudian dilakukan analisis mengenai fenomena-fenomena yang terdapat dalam data dan tabel tersebut.

Definisi Operasional Variabel

1. Rasio kemandirian keuangan daerah atau yang sering disebut sebagai otonomi fiskal menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio ini juga menggambarkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi, Halim Abdul (2012).
2. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah, Halim Abdul (2012).
3. Rasio aktivitas menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal, Halim Abdul (2012).
4. Rasio pengelolaan belanja menunjukkan bahwa kegiatan belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah memiliki equitas antara periode yang positif, yaitu belanja yang dilakukan tidak lebih besar dari total pendapatan yang diterima pemerintah daerah, Fidelius (2013).
5. Rasio pertumbuhan *(growth ratio)* mengukur seberapa besar kemapuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya, Halim Abdul (2012).

6. Pendapatan daerah adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah, PP No. 24 Tahun 2005.
7. PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, Halim Abdul (2012).
8. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tuhun anggaran yang tidak akan di peroleh pembayarannya kembali oleh daerah, Darise Nurlan (2009)
9. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, Halim Abdul (2012).
10. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, Halim Abdul (2012).

PEMBAHASAN

Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Analisis Rasio Keuangan Pada APBD Kabupaten Sarolangun Tahun 2011-2013.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan oleh daerah, Halim Abdul (2012).

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel. 5. Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabuapten Sarolangun Tahun Anggaran 2011-2013 (Dalam Rupiah)

No	Tahun	Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi	Realisasi PAD	Rasio Kemandirian %	Keterangan
1	2011	634.189.080.943,69	31.605.925.980,21	4,98	Rendah Sekali
2	2012	723.561.999.052,79	28.007.764.671,40	3,87	Rendah Sekali
3	2013	791.613.688.633,50	31.307.607.303,24	3,95	Rendah Sekali
	Rata-rata			**4,26**	**Rendah Sekali**

Sumber : DISPENDA Kabupaten Sarolangun (data diolah)

Berdasarkan perhitungan kemandirian keuangan diatas bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, yaitu pada tahun 2011 sebesar 4,98 persen dengan kategori rendah sekali, menurun sebesar 3,87

persen ditahun 2012 dengan kategori rendah sekali serta meningkat 0,08 persen ditahun 2013 menjadi 3,95 persen dengan kategori rendah sekali.

Rasio kemandirian keuangan Kabupaten Sarolangun selama tiga tahun anggaran rata-rata 4,26 persen dapat dikategorikan rendah sekali (dibawah 25 persen). Ini berarti bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman pada APBD masih kecil dan juga berarti bahwa peran pemerintah pusat masih sangat dominan dalam APBD yang dapat dilihat dari besarnya penerimaan yang berasal dari transfer pemerintah atau instansi yang lebih tinggi, dana perimbangan serta lain-lain penerimaan yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat masih sangat besar dalam mencukupi kebutuhan belanja untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah daerah, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Meskipun kinerja pengelolaan keuangan berdasarkan rasio kemandirian Kabupaten Sarolangun dikategorikan rendah sekali tetapi perkembangan setiap tahunnya semakin meningkat yang bahwa sudah ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk dapat mandiri dengan meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi.

Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil, Halim Abdul (2012).

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \text{ X } 100\%$$

Tabel. 6. Perhitungan Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2011 -2013 (Dalam Rupiah)

No	Tahun	Target Penerimaan PAD	Realisasi Penerimaan PAD	Rasio Efektivitas (%)	Keterangan
1	2011	26.896.483.592,00	31.605.925.980,21	117,51	Sangat Efektiv
2	2012	31.453.982.000,00	28.007.764.671,40	89,04	Cukup Efektiv
3	2013	31.293.482.000,00	31.307.607.303,24	100,05	Sangat Efektiv
Rata-rata				**102,2**	**Sangat Efektiv**

Sumber : DISPENDA Kabupaten Sarolangun (data diolah)

Berdasarkan hasil penelitian diketahui rasio efektivitas keuangan daerah Kabupaten Sarolangun selalu berubah di setiap tahunnya. Dimana rasio efektivitas keuangan daerah Kabupaten Sarolangun tertinggi di capai pada tahun 2011 yaitu sebesar 117,51 persen dengan kategori sangat efektiv namun di tahun 2011 mengalami penurunan yaitu sebesar 89,04 persen dengan kategori cukup efektiv dan meningkat kembali ditahun 2013 sebesar 100,05 persen dengan kategori sangat efektiv.

Rasio efektivitas keuangan Kabupaten Sarolangun selama tiga tahun anggaran rata-rata 102,2 persen dapat dikategorikan sangat efektiv karena rasio efektivitas melebihi 100 persen sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sarolangun dianggap berhasil dalam meningkatkan realisasi pendapatan asli daerahnya sehingga melebihi target anggaran yang ditetapkan.

Rasio Aktivitas Keuangan Daerah

Rasio aktivitas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dalam memperioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi atau pada belanja modal secara optimal, Halim Abdul (2012).

Rasio Aktivitas dihitung sebagai berikut :

1. Rasio Belanja Operasi Terhadap APBD

$$\text{Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi Terhadap APBD}}{\text{Total APBD}} \text{ x } 00\%$$

Tabel. 7. Perhitungan Rasio Belanja Operasi Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2011-2013 (Dalam Rupiah)

Tahun	Belanja Operasi	Total APBD	Rasio Belanja Rutin %
2011	448.053.261.274,00	665.795.006.923,90	67,29
2012	505.578.240.245,00	751.569.763.724,19	67,26
2013	538.695.602.444,00	822.921.295.936,74	65,56
Rata-Rata			**66,70**

Sumber : DISPENDA Kabupaten Sarolangun (data diolah)

Dari perhitungan rasio belanja operasi Kabupaten Sarolangun dapat dilihat bahwa pada tahun 2011 rasio belanja operasi sebesar 67,29 persen dan menurun sebesar 0,3 persen menjadi 67,26 persen pada tahun 2012 serta menurun lagi ditahun 2013 sebesar 1,7 persen sehingga rasio belanja operasi Kabupaten Sarolangun pada tahun 2013 menjadi 65,56 persen dengan rata-rata 66,70 persen.

2. Rasio Belanja Modal Terhadap APBD

$$\text{Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal Terhadap APBD}}{\text{Total APBD}} \text{ X } 100\%$$

Tabel. 8.Perhitungan Rasio Belanja Modal Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2011-2013 (Dalam Rupiah)

Tahun	Belanja Modal	Total APBD	Rasio Belanja Modal %
2011	185.875.313.011,00	665.795.006.923,90	27,92
2012	219.506.728.078,00	751.569.763.724,19	29,20
2013	199.497.286.754,00	822.921.295.936,74	24,24
Rata-Rata			**27,12**

Sumber : DISPENDA Kabupaten Sarolangun (data diolah)

Dari perhitungan rasio belanja modal Kabupaten Sarolangun dapat dilihat bahwa pada tahun 2011 rasio belanja modal sebesar 27,92 persen dan meningkat sebesar 1,28

persen menjadi 29,20 persen pada tahun 2012 namun menurun lagi ditahun 2013 sebesar 4,96 persen sehingga rasio belanja modal Kabupaten Sarolangun pada tahun 2013 menjadi 24,24 persen dengan rata-rata 27,12 persen.

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Sarolangun lebih memperioritaskan belanjanya pada belanja operasi daripada belanja modal (pembangunan). Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi berarti presentase belanja modal (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Pemerintah daerah Kabupaten Sarolangun perlu menekan belanja operasi seperti belanja pegawai dan belanja barang yang terlalu besar guna dialokasikan untuk belanja modal. Hal ini dianggap perlu untuk diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Sarolangun walaupun patokan untuk besarnya belanja operasi dan belanja modal terhadap APBD belum ada. Namun sebagai daerah yang berada di negara berkembang pemerintah daerah seharusnya meningakatkan belanja modal (pembangunan) dalam menyediakan sarana prasarana yang mendukung untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik.

Rasio Pengelolaan Belanja Keuangan Daerah

Rasio pengelolaan belanja menunjukkan bahwa kegiatan belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah memiliki ekuitas antar periode yang positif, yaitu belanja yang dilakukan tidak lebih besar dari total pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah, Fidelius (2013). Rasio ini menunjukkan adanya surplus/defisit anggaran.

1. Surplus/Defisit Anggaran

Surplus/Defisit = Total Pendapatan – Total Belanja

Tabel. 9. Laporan Surplus atau Defisit Anggaran Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2011-2013 (Dalam Rupiah)

Tahun	Total Pendapatan	Total Belanja	Surplus/defisit
2011	665.795.006.923,90	634.977.459.085,00	30.817.547.838,90
2012	751.569.763.724,19	725.384.968.323,00	8.326.890.776,58
2013	822.921.295.936,74	777.889.586.009,00	45.031.709.927,74

Sumber : DISPENDA Kabupaten Sarolangun (data diolah)

Dari perhitungan pengelolaan belanja di atas dapat dilihat bahwa kinerja laporan anggaran pengelolaan belanja pada tahun 2011 menunjukkan adanya surplus sebesar Rp. 30.817.547.838,90, pada tahun 2012 mengalami penurun sebesar Rp. 8.326.890.776,58 dan pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar Rp. 45.031.709.927,74. Hal ini bisa di sebabkan karena meningkatnya realisasi atas pendapatan Kabupaten Sarolangun setiap tahunnya.

2. Rasio Pengelolaan Belanja

$$\text{Pengelolaan Belanja} = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Total Belanja}} \text{ X } 100\%$$

Tabel. 10. Perhitungan Rasio Pengelolaan Belanja Kabupaten Sarolangun Tahun Angaran 2011-2013 (Dalam Rupiah)

Tahun	Total Pendapatan	Total Belanja	Rasio Pengolaan Belanja %
2011	665.795.006.923,90	634.977.459.085,00	104,85
2012	751.569.763.724,19	725.384.968.323,00	103,61
2013	822.921.295.936,74	777.889.586.009,00	105,79
Rata-Rata			**104,75**

Sumber :DISPENDA Kabupaten Sarolangun (data diolah)

Dari perhitungan rasio pengelolaan belanja di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2011 rasio pengelolaan belanja sebesar 104,85 persen, dan mengalami penurun pada tahun 2012 sebesar 103,61 % serta meningkat lagi ditahun 2013 sebesar 105,79.

Rata-rata rasio pengelolaan belanja Kabupaten Sarolangun sebesar 104,75 persen. Hal ini bisa disebabkan karena meningkatnya realisasi atas pendapatan Kabupaten Sarolangun setiap tahunnya. Peningkatan pendapatan tersebut disertai dengan kemampuan pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam menekan realisasi atas belanja. Sehingga total belanja pemerintah Kabupaten Sarolangun lebih rendah bila dibandingkan dengan total pendapatan Kabupaten Sarolangun. Dengan demikian kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sarolangun baik jika dilihat berdasarkan rasio pengelolaan belanja.

Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilanya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya, Halim Abdul (2012). Rasio pertumbuhan dapat dihitung dengan:

$$\text{Persentase pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PAD tahun } p - \text{PAD tahun } p\text{-}1}{\text{PAD tahun } p\text{-}1} \times 100\%$$

$$\text{Persentase pertumbuhan total Pendapata} = \frac{\text{Pendapatan tahun } p - \text{Pendapatan tahun } p\text{-}1}{\text{X 100\% Pendapatan tahun } p\text{-}1} \times 100\ \%$$

$$\text{Persentase pertumbuhan Belanja Operasi} = \frac{\text{Belanja Operasi tahun } p - \text{Belanja Operasi tahun } p\text{-}1}{\text{Operasi tahun } p\text{-}1} \times 100\%$$

$$\text{Persentase pertumbuhan Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal tahun } p - \text{Belanja Modal tahun } p\text{-}1}{\text{Belanja Modal tahun } p\text{-}1} \times 100\%$$

Tabel. 11. Perhitungan Rasio Pertumbuhan Realisasi APBD Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2011-2013 (Dalam Rupiah)

No	Keterangan	2011	2012	2013	Rata-Rata
1	PAD (Rp)	31.605.925.980,21	28.007.764.671,40	31.307.607.303,24	
	Rasio Pertumbuh an PAD (%)	-	-11,38	11,78	**0,13**
2	Total Pendapatan (Rp)	665.795.006.923,90	751.569.763.724,19	822.921.295.936,74	
	Rasio Pertumbuhan Pendapatan (%)	-	12,88	9,49	**7,45**
3	Belanja Operasi (Rp)	448.053.261.274,00	505.578.240.245,00	538.695.602.444,00	
	Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi (%)	-	12,84	6,55	**6,46**
4	Belanja Modal (Rp)	185.875.313.011,00	219.506.728.078,00	199.497.286.754,00	
	Rasio Pertumbuhan Belanja Modal (%)	-	18,09	-9,11	**2,99**

Sumber :DISPENDA Kabupaten Sarolangun (data diolah)

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa rasio pertumbuhan PAD Kabupaten Sarolangun dari tahun 2011-2013 menunjukkan pertumbuhan yang negatif pada tahun 2012 yaitu menjadi -11,38 persen, tetapi meningkat pada tahun 2013 menjadi 11,78 persen dengan rata-rata yang hanya 0,13 persen, ini dikarenakan PAD Kabupaten Sarolangun 2011 lebih besar di bandingkan PAD 2012. Rasio pertumbuhan pendapatan Kabupaten Sarolangun dari tahun 2011-2013 menunjukkan pertumbuhan yang positif setiap tahunnya, pada tahun 2012 rasio pertumbuhan pendapatan Kabupaten Sarolangun sebesar 12,84 persen, namun menurun pada tahun 2013 menjadi 9,49 persen dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,45 persen . Sehingga dapat disimpulkan kinerja pengelolaan keuangan Kabupaten Sarolangun baik walaupun pertumbuhan PAD Kabupaten Sarolangun pada tahun 2012 negatif, tetapi pertumbuhan PAD Kabupaten Sarolangun meningkat ditahun 2013 dan walaupun pertumbuhan pendapatan tahun 2013 lebih rendah dari tahun 2012 tetapi setidaknya pemerintah mampu mempertahankan penerimaan pendapatan dan tetap mengalami pertumbuhan setiap tahunnya.

Pertumbuhan belanja Kabupaten Sarolangun yaitu belanja operasi mengalami pertumbuhan yang positif setiap tahunnya, pada tahun 2012 pertumbuhan belanja operasi sebesar 12,84 persen dan menurun ditahun 2013 sebesar 6,55 persen dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,46 persen sedangkan pertumbuhan belanja modal pada tahun 2012 sebesar 18,09 persen dan pada tahun

2013 sebesar -9,11 persen yaitu negatif atau tidak mengalami pertumbuhan dengan rata-rata sebesar 2,99 persen. Hal ini diakibatkan karena belanja modal pada tahun 2012 lebih besar dibandingkan dengan belanja modal tahun 2013.

2. **Perkembangan Pendapatan (APBD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2011-2013**

Ditetapkannya Kabupaten Sarolangun sebagai daerah otonom membawa perubahan yang sangat baik dalam sistem pemerintah daerah, dengan diberlakukannya otonomi daerah tersebut dapat memberikan kewenangan kepada Kabupaten Sarolangun untuk mengurus dan menggali sumber daya yang ada di Kabupaten Sarolangun dalam upaya meningkatkan pendapatan keuangan daerah dari sistem pemerintahan yang lebih baik. Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun selalu berupaya untuk meningkatkan pendapatan dan kemampuan keuangan daerah dengan menetapkan peraturan dan kebijakan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan keuangan daerah.
Perkembangan pendapatan APBD Kabupaten Sarolangun dari tahun 2011- 2013 dapat dilihat dari tabel 5.8 dibawah ini.

Tabel. 12. Perkembangan Pendapatan APBD Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2011-2013 (Dalam Rupiah)

Tahun	Pendapatan Daerah (APBD)	Peningkatan
2011	665.795.006.923,90	-
2012	751.569.763.724,19	85.774.756.800,29
2013	822.921.295.936,74	71.351.532.212,55

Sumber : DISPENDA Kabupaten Sarolangun (data diolah)

Di lihat dari tabel. 8 tentang perkembangan pendapatan APBD dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, yaitu untuk tahun 2011 sebesar Rp. 665.795.006.923,90, meningkat di tahun 2012 sebesar Rp. 751.569.763.724,19 dengan peningkatan sebesar Rp 85.774.756.800,29, dan meningkat lagi pada tahun 2013 sebesar Rp. 822.921.295.936,74 dengan peningkatan sebesar Rp. 71.351.532.212,55.

Simpulan

1. Adapun kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah berdasarkan analisis rasio keuangan pada APBD kabupaten sarolangun tahun 2011-2013 sebagai berikut :
   a. Rasio kemandirian keuangan Kabupaten Sarolangun selama tiga tahun anggaran rata-rata 4,26 persen dapat dikategorikan rendah sekali (dibawah 25 persen).
   b. Rasio efektivitas keuangan Kabupaten Sarolangun selama tiga tahun anggaran rata-rata 102,2 persen dapat dikategorikan sangat efektiv karena rasio efektivitas melebihi 100 persen.
   c. Rata-rata rasio belanja operasi sebesar 66,77 persen dan rata-rata rasio belanja modal sebesar 27,12 persen.
   d. Kabupaten Sarolangun mengalami surplus anggaran dari tahun ketahun dan memiliki rata-rata rasio pengelolaan belanja sebesar 104,85 persen.

e. Rasio pertumbuhan PAD Kabupaten Sarolangun dari tahun 2011- 2013 memiliki rata-rata sebesar 0,13 persen. Rasio pertumbuhan pendapatan Kabupaten Sarolangun dari tahun 2011-2013 memiliki rata-rata sebesar 7,45 persen. Pertumbuhan belanja Kabupaten Sarolangun dari tahun 2011-2013 yaitu belanja operasi memiliki rata- rata sebesar 6,46 persen sedangkan pertumbuhan belanja modal memiliki rata-rata sebesar 2,99 persen.

2. Perkembangan pendapatan APBD Kabupaten sarolangun selama tiga tahun anggaran terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun.

Saran-saran

1. Pemerintah Kabupaten Sarolangun harus mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat yaitu dengan mengoptimalkan potensi sumber pendapatan yang ada atau dengan meminta kewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber pendapatan lain ynag masih dikuasai oeleh pemerintah pusat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sarolangun dengan meningkatkan kualitas sumber daya manuasia baik aparatur daerah maupun masyarakat dengan diimbangi perluasan lapangan kerja Kabupaten Sarolangun agar pendapatan masyarakat Kabupaten Sarolangun meningkat sehingga retribusi dan pajak yang dibayar masyarakat meningkat pula.
3. Meningkatkan pembangunan serta penyediaan sarana dan prasarana umum untuk meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat Kabupaten Sarolangun dan untuk menarik investor agar menanamkan modalnya di Kabupaten Sarolangun.

DAFTAR PUSTAKA

Anton, 30 Mei 2012, *Banyak Temuan BPK Beri Opini WDPI*, www.metrojambi.com/v1/daerah/4130-banyak-temuan-bpk-berikan- opini-wdp.html.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi, 23 Mei 2013, Opini *WDP untuk LKPD Kabupaten Sarolangun, Tebo dan Bungo*, www.jambi.bpk.go.id/?p=5143#.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sarolangun, *Sarolangun Dalam Angka Periode 2011 sampai 2013*, Sarolangun : BPS.

Bagus Suryono, Wiratno, 2012, AnalisisPengaruh Pendapatan Asli Daerah, Tingkat Investasi dan Tenaga Kerja terhadap PDRB Jawa Tengah, Universitas Diponegoro.

Darise, Nurlan, 2009, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Indeks, Jakarta.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sarolangun, *Sarolangun Dalam Angka Periode 2011 sampai 2013*, Sarolangun : DISPENDA

Fidelius, 2013, Analisis Rasio untuk Mengukur Kinerja Keuangan Daerah, Jurnal EMBA, ISSN : 2303 – 1174, Vol. 1 No. 4 Desember 2013, Hal 2088 – 2096, Universitas Sam Ratulangi : Manado.

Halim, Abdul, *2012, Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Keempat, Salemba Empat, Jakarta.

....., *2007, Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Ketiga, Salemba Empat, Jakarta.

....., *2002, Akuntansi Keuangan Daerah,* Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta.

Ichwan, Rudi, 08 Juni 2014, *Pontang-Panting Kejar WTP, Ehhh Malah Dapat WDP,* www.infojambi.com/peristiwa/11216-pontang-panting-kejar- wtp-ehhh-malah dapat-wdp.html.

Julitawati, Ebit, 2012, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, Jurnal EMBA, ISSN 2302-0164, Volume 1, No. 1, Agustus. Universitas Syiah Kuala : Banda Aceh.

Kuncoro, Thesaurianto 2007, Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Daerah Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Timur. Universitas Diponegoro : Semarang.

Mahmudi, 2007, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,* UPP STIM YKPN, Yogyakarta

Mardiasmo, 2002, *Akuntansi Sektor Publik,* Andi, Yogyakarta.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

....., Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

....., Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

....., Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

....., Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

....., Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Daerah.

....., Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D),* Alfabeta, Bandung.

Tanjung, Abdul Hafiz, 2006, *Akuntansi Pemerintahan Daerah (Konsep dan Aplikasi),* Alfabeta, Bandung.

Yani, Ahmad, 2002, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia,* Rajawali Pers, Jakarta.